

**JURNAL SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ABORSI DENGAN INDIKASI MEDIS**  
**KARENA KEHAMILAN AKIBAT *INCEST***



**Disusun oleh :**

**Ernny Apriyanti Salakay**

**NPM : 100510359**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaia**

**Sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

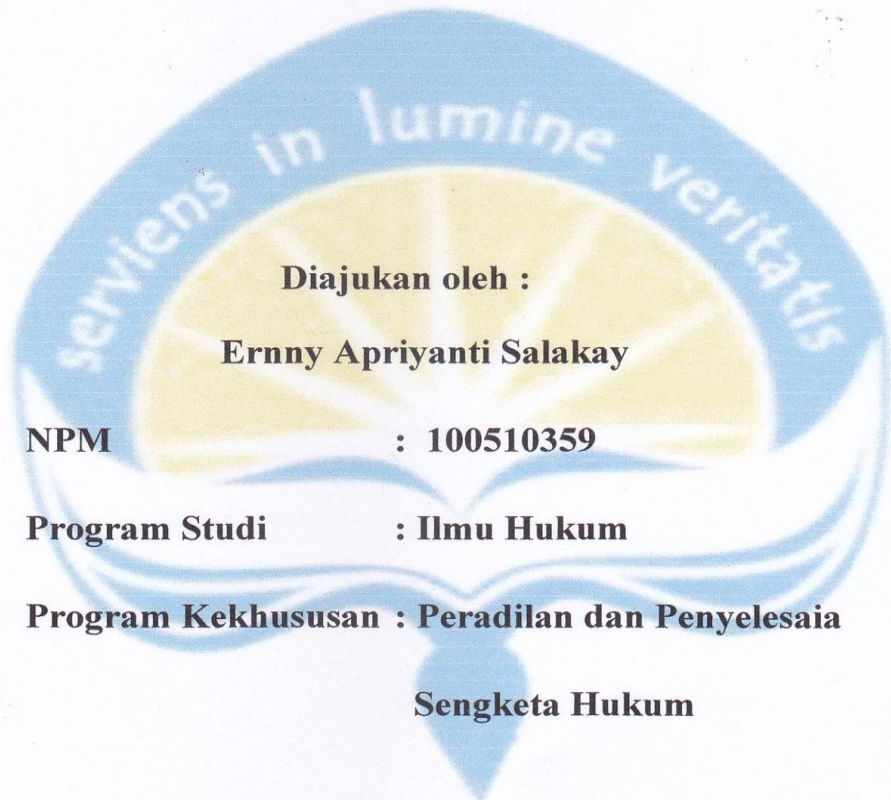
**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ABORSI DENGAN INDIKASI MEDIS**

**KARENA KEHAMILAN AKIBAT *INCEST***



**Diajukan oleh :**

**Ernny Apriyanti Salakay**

**NPM : 100510359**

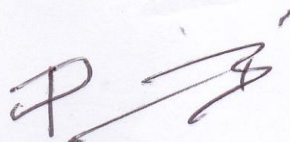
**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaia  
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui,**

**Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 13 Desember 2013**

**Dosen Pembimbing,**



**Dr. Drs. Paulinus Soge, SH. M.Hum**

- I. Judul tugas akhir : Tinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Dengan Indikasi Medis Karena Kehamilan Akibat *Incest*.
- II. Nama Mahasiswa : Ernny Apriyanti Salakay. Nama Pembimbing : Paulinus Soge.
- III. Program studi : Ilmu Hukum, Fakultas : Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- IV. Abstrak

This research was aimed to know whether a medical-indicated abortion due to an incest pregnancy was judged by laws. This law research used a normative method. This law research focused on a positive law namely regulations and this research needed a secondary law material as a main data. Abortion was a fetus miscarriage, conducted abortion (intended due to she did not want the baby delivered). Abortion was divided into criminal abortion i.e. an intended abortion due to a reason and violating laws and legal abortion i.e. abortion with authorization of related parties. Abortion with a medical indication due to incest pregnancy from criminal legal aspects namely, judged by the law or legal if the abortion was conducted with medical indication due to incest pregnancy meet wording of Article 75 verse b (2) letter a of Regulation Number 36 of 2009. As described in the article that abortion can be done with the exception if there are indications of a medical emergency which has been detected at an early age pregnancy. Abortion has also been conducted by medical considerations by a team of experts. if the woman conducted abortion in a forced situation due to she experienced a severe psychological pressure the judges could harmonize law provisions with a medical view that an incest pregnancy was a reason to conduct abortion with a medical indication. With such harmonization the judges could freed the woman based on an apologizing reason due to she conducted abortion based on a force power as what regulated in Article 48 of Criminal Law (KUHP). Keywords: Abortion, Medical indication, Incest, Legal harmonization.

## V. Pendahuluan

### A. Latar Belakang Masalah

Selama berabad-abad yang lalu aborsi telah dilakukan oleh manusia, karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang tindakan aborsi. Banyak orang berpikir bahwa aborsi adalah urusan pribadi, urusan privat yang tidak menyangkut orang lain. Tindakan aborsi jelas bukan semata-mata menyangkut masalah pribadi tetapi juga menyangkut orang lain yakni janin yang hendak digugurkan. Pada kenyataannya hidup manusia dimulai saat selesainya proses pembuahan dimana segala sesuatu telah ada dalam gennya. Hidup manusia maupun seksualitas tidak bisa diprivatisasikan.

Aborsi bukan merupakan urusan pribadi sebab tindakan tersebut menyangkut hidup orang lain yang dirampas demi kepentingan tertentu. Bentuk perampasan yang dilakukan menimbulkan ketidakadilan karena janin yang tidak bersalah dihukum mati. Apapun alasannya tidak dibenarkan jika orang yang tidak bersalah dirampas haknya untuk hidup.

Permasalahan mengenai aborsi menjadi sangat kompleks dan sulit ditemukan solusinya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan menyangkut dasar hukum ataupun norma-norma yang menjadi sumber patokannya. Secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan aborsi diancam dengan pidana namun dalam undang-undang lain terdapat pengecualian atau penyimpangan terhadap aturan tersebut. Banyak pandangan, penilaian, serta pemaknaan yang berbeda-beda yang timbul mengenai aborsi. Aborsi seharusnya dinilai berdasarkan hukum positif yang ada.

Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, permasalahan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis* (atas dasar pertimbangan kesehatan).

Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hak aborsi dibenarkan secara hukum jika dilakukan karena adanya alasan atau pertimbangan medis atau kedaruratan medis. Dengan kata lain, tenaga medis mempunyai hak untuk melakukan aborsi bila ada pertimbangan medis atau kedaruratan medis dan dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 berisi ketentuan bahwa setiap orang dilarang melakukan

aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 yang berisi pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu indikasi medis untuk dilakukan aborsi ialah aborsi akibat *incest*. *Incest* (hubungan sumbang) adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. *Incest* diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat), atau bahkan *letal* (mematikan). Dari segi medis aborsi karena kehamilan yang disebabkan *incest* digolongkan sebagai *abortus provocatus*. Dalam hal ini aborsi dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya keturunan yang cacat atau keturunan yang mengalami kelainan genetik. Jenis aborsi ini dilakukan berdasarkan kehendak atau keinginan perempuan yang bersangkutan.

#### B. Rumusan Masalah

Apakah aborsi dengan indikasi medis karena kehamilan akibat *incest* dibenarkan oleh hukum?

#### VI. Isi Makalah:

### **ABORSI SEBAGAI TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA**

Kejahatan terhadap nyawa adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Hal ini termuat dalam KUHP bab XIX dengan judul “kejahatan terhadap nyawa” yang diatur dalam pasal 338-350.

Pengguguran kandungan adalah terjemahan dari kata *abortus provocateur* yang dalam kamus kedokteran diterjemahkan dengan membuat keguguran, pengguguran kandungan diatur dalam KUHP pasal 346, 347, 348, dan 349. Unsur dari pasal-pasal tersebut Janin, Ibu yang mengandung, Orang ketiga yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut. Tujuan adanya pasal-pasal tersebut adalah untuk melindungi janin yang ada dalam kandungan si ibu.

Ketentuan dalam KUHP jika dicermati maka dilandasi suatu pemikiran atau paradigma bahwa anak yang masih dalam kandungan merupakan subjek hukum sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan kata lain paradigma yang digunakan adalah paradigma yang mengedepankan hak anak (*pro life*). Oleh karena itu dalam KUHP tindakan aborsi dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Adapun yang dapat dikenai sanksi pidana berkaitan dengan perbuatan aborsi adalah perempuan yang menggugurkan kandungannya itu sendiri dan juga mereka yang terlibat dalam proses terjadinya aborsi seperti dokter, bidan atau juru obat.<sup>1</sup>

#### **TINDAK PIDANA ABORSI DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN**

Seorang perempuan tidak mampu mempertahankan kehamilannya karena adanya diagnosis dari dokter terhadap kesehatan dan keselamatan nyawanya ataupun bayinya. Jenis aborsi ini secara hukum dibenarkan dan mendapat perlindungan hukum sebagaimana telah diatur dalam pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ada beberapa hal yang dapat dicermati dari jenis aborsi ini yaitu bahwa ternyata aborsi dapat dibenarkan secara hukum apabila

---

<sup>1</sup> [www.genderkesrepro.info.com](http://www.genderkesrepro.info.com), Siswandi Suarta, Kontroversi Seputar Aborsi,.

dilakukan dengan adanya pertimbangan medis. Dalam hal ini berarti dokter atau tenaga kesehatan mempunyai hak untuk melakukan aborsi dengan menggunakan pertimbangan demi menyelamatkan ibu hamil atau janinnya.

Berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tindakan medis (aborsi) sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Aborsi tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya. Hal tersebut berarti bahwa apabila prosedur tersebut telah terpenuhi maka aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum. Dengan kata lain diagnosa medis oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan tindak pidana atau kejahatan. Berbeda dengan aborsi yang dilakukan karena ada pertimbangan medis sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi yang dilakukan tanpa ada pertimbangan medis disebut dengan aborsi provokatus kriminalis. Artinya bahwa tindakan aborsi seperti ini dikatakan tindakan ilegal atau tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi seperti ini dikatakan sebagai tindakan pidana atau kejahatan.

## **TINDAK PIDANA ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA**

Hak asasi itu dimiliki oleh orang yang hidup, sebab hak itu ada dan berakhir saat manusia itu hidup dan berakhir hidupnya. Hak untuk hidup menjadi syarat utama dan mendasar ketika membicarakan mengenai hak asasi manusia. Hak untuk hidup adalah lebih dari sekedar hak fundamental. Ini adalah kondisi yang memungkinkan hak-hak lainnya untuk ada.<sup>2</sup>

Tindakan aborsi ini dianggap sama dengan pembunuhan, karena dalam ilmu biologi, disebutkan bahwa embrio terbentuk karena ada pertemuan sel sperma dan sel telur. Sebenarnya sel sperma dan sel telur itu sendiri merupakan sel hidup, sehingga mulai dari awal pembuahan sudah dapat dikatakan ada kehidupan. Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. maka aborsi. Perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman.

Tindak pidana aborsi dengan alasan apapun tetap tidak dibenarkan menurut hak asasi manusia. Secara jelas dapat dilihat pada ketentuan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 53 ayat (1) yang menentukan bahwa “anak mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya sejak dari dalam kandungan”.

## **PENGERTIAN ABORSI**

---

<sup>2</sup> DR. CB. Kusmaryanto, SCJ, 2005, *Tolak Aborsi*, Yogyakarta, hlm.64.



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, abortus didefinisikan sebagai terjadi keguguran janin, melakukan abortus sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu).<sup>3</sup>

Di dalam *Black's Law Dictionary* (Black, et al., 1990), sebagaimana dikutip Paulinus Soge dijelaskan bahwa "*abortion is the spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in legal context, usually refers to induced abortion.*" (*Abortion* adalah keluarnya embrio atau janin secara spontan/dengan sendirinya atau artifisial/buatan/disengaja. Dalam konteks hukum biasanya ditujukan pada keluarnya embrio atau janin yang dilakukan dengan sengaja).<sup>4</sup>

### **MACAM-MACAM ABORSI**

- a. Musa Perdanakusuma membagi pengguguran kandungan menjadi 2 jenis :
- 1) *Abortus Spontaneous* yaitu abortus yang terjadi dengan sendirinya bukan karena perbuatan manusia, dan
  - 2) *Abortus provocatus*, yaitu abortus yang terjadi karena perbuatan manusia. *Abortus provocatus* dapat terjadi karena :
    - a) Didorong oleh alasan medis
- Misalnya: karena perempuan yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa perempuan tersebut kandungannya harus digugurkan. *Abortus* yang didorong oleh alasan medis ini disebut *abortus provocatus therapeuticus*.

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.5.

<sup>4</sup> Paulinus Soge, 2010, Hukum aborsi: *Tinjauan politik hukum pidana terhadap perkembangan hukum aborsi di Indonesia*, Penerbit UAJY, Yogyakarta, hlm.308-309

- b) Didorong oleh alasan-alasan lain yang tidak dibenarkan oleh hukum. Abortus ini biasa disebut sebagai *abortus provocatus criminalis*.<sup>5</sup>

## **ABORSI DENGAN INDIKASI MEDIS**

Aborsi dengan indikasi medis antara lain:

- a. Aborsi atas indikasi ibu merupakan pengguguran kandungan sebagai tindakan pengobatan atau untuk menolong jiwa ibu dari bahaya kematian.
- b. Aborsi atas indikasi janin merupakan pengguguran kandungan karena janin mengalami kromosom atau adanya kelainan metabolisme.<sup>6</sup>
- c. Janin mengalami cacat fisik atau cacat mental yang berat. Jika anak yang lahir nanti cacat fisik atau cacat mental yang berat, maka pertimbangan medis membolehkan untuk dilakukannya aborsi.
- d. Nyawa ibu terancam bahaya maut jika tetap melanjutkan kehamilan. Misalnya: seorang ibu hamil yang di diagnosis sebagai penderita kanker rahim dan menurut dokter penyakit itu harus segera dibuang karena membahayakan nyawa ibu, contoh lainnya apabila si ibu mengidap penyakit jantung yang dalam hal ini seorang perempuan yang sakit jantung sering dianjurkan oleh dokter agar tidak hamil karena jantungnya tidak kuat dengan kahemilan selama 9 bulan. Tetapi apabila terjadi kehamilan, maka biasanya dokter akan menganjurkan si ibu untuk beristirahat total di tempat tidur.<sup>7</sup>
- e. Kehamilan ektopik terganggu.  
  
Sering terjadi bahwa sesudah pembuahan, embrio muda tidak sampai pada tempat yang semestinya dalam rahim, tetapi dalam perjalanan ke rahim menempel ke tempat lain, biasanya dalam tuba *Fallopii*. Sementara itu, embrio muda tersebut

---

<sup>5</sup> Suryono Ekotama, dkk, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm 33-34.

<sup>6</sup> Made Heny Urmila Dewi, 1997, *Aborsi Pro dan Kontra di Kalangan Petugas Kesehatan*, hlm.34.

<sup>7</sup> Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto, G.Widiartana, *Op. Cit*, hlm.35.

terus tumbuh, dalam hal ini jika kehamilan ini diteruskan akan membahayakan kesehatan dan keselamatan si ibu. Kalau dibiarkan berkembang, ibu pasti akan mati dan janin tidak pernah dapat diselamatkan, kondisi medis ini disebut sebagai “kehamilan ektopik terganggu”.

f. Janin *Anencephaly*

*Anencephaly* ialah ketiadaan sebagian atau keseluruhan dari tulang bagian depan dari tengkorak, terutama pada bagian otak. Hal ini terjadi karena cacat dalam perkembangan janin oleh karena ketidaksempurnaan penutupan pada ujung saraf janin sehingga urat saraf yang masih lemah dalam pembentukan itu tidak mendapatkan perlindungan sehingga ‘termakan’. Namun yang mati baru sebagian otak besar saja tetapi batang otaknya belum, maka tergolong masih hidup.<sup>8</sup>

**BENTUK-BENTUK *INCEST***

Berdasarkan penyebabnya, maka *incest* dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. *Incest* yang terjadi secara tidak sengaja, misalnya kakak-adik lelaki perempuan remaja yang tidur sekamar, biasa tergoda melakukan eksperimentasi seksual sampai terjadi *incest*.
- b. *Incest* akibat psikopatologi berat. Jenis ini biasa terjadi antara ayah yang alkoholik atau psikopatik dengan anak perempuannya. Penyebabnya adalah kondornya kontrol diri akibat alkohol atau psikopati sang ayah.
- c. *Incest* akibat *pedofilia*, misalnya seorang lelaki yang haus menggauli anak-anak perempuan di bawah umur, termasuk anaknya sendiri.
- d. *Incest* akibat contoh buruk dari ayah. Seorang lelaki menjadi senang melakukan *incest* karena meniru ayahnya melakukan perbuatan yang sama dengan kakak atau adik perempuannya.

---

<sup>8</sup> DR. CB. Kusmaryanto, SCJ, *Op.Cit* , hlm 126.

- e. *Incest* akibat patologi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Seorang suami-ayah yang tertekan akibat sikap memusuhi serba mendominasi dari istrinya bisa terpojok melakukan *incest* dengan anak perempuannya.<sup>9</sup>

### **DAMPAK DAN RESIKO AKIBAT *INCEST***

Hubungan seksual sedarah sendiri ada yang bersifat sukarela dan ada yang bersifat paksaan. *Incest* memiliki alasan lebih besar yang patut dipertimbangkan dari kesehatan medis. Banyak penyakit genetik yang berpeluang muncul lebih besar. Sebut saja pada genetik, kromosom yang mengalami gangguan kesehatan jiwa (*skizoprenia*), *leukodystrophie* atau kelainan pada bagian saraf yang disebut milin, ada bagian dari jaringan penunjang pada otak yang mengalami gangguan yang menyebabkan proses pembentukan enzim terganggu. Selain itu, perkawinan sedarah juga menghasilkan keturunan albino (kelainan pada pigmen kulit) dan keterlambatan mental (idiot) serta perkembangan otak yang lemah. Banyak penyakit keturunan yang akan semakin kuat dilahirkan pada pasangan yang memiliki riwayat genetik buruk dan terjadi *incest*. Hal lain yang harus diwaspadai juga yakni kecacatan kelahiran bisa muncul akibat ketegangan saat ibu mengandung dan adanya rasa penolakan secara emosional dari ibu.<sup>10</sup>

### **VII. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini, yaitu bahwa aborsi dengan indikasi medis karena kehamilan akibat *incest* dari segi hukum pidana adalah:

---

<sup>9</sup> [www.incestdanindikasimedis.com](http://www.incestdanindikasimedis.com)

<sup>10</sup> [www.artikelincest](http://www.artikelincest), 6 Februari 2012

Aborsi karena kehamilan akibat *incest* tetap tidak dapat dibenarkan secara hukum kecuali ada pertimbangan medis. Aborsi yang dilakukan dengan indikasi medis karena kehamilan akibat *incest* memenuhi rumusan Pasal 75 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal tersebut bahwa aborsi dapat dilakukan dengan pengecualian apabila ada indikasi kedaruratan medis yang telah dideteksi sejak usia dini kehamilan. Aborsi yang dilakukan juga telah melalui pertimbangan medis oleh tim ahli. Tindakan medis dilakukan dengan indikasi medis karena kehamilan akibat *incest* untuk mencegah adanya kelainan genetik yang timbul pada janin yang akan dilahirkan atau janin tersebut mengalami kecacatan akibat dilahirkan dari pasangan yang memiliki riwayat genetik sama. Di sisi lain kecacatan juga dapat timbul karena ketegangan dan rasa penolakan secara emosional dari ibu saat mengandung.

## Daftar Pustaka

### Buku :

Dewi, M. H. U, 1997, *Aborsi Pro dan Kontra di Kalangan Petugas Kesehatan*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta.

Ekotama Suryono., ST.Harum Pudjiarto, G Widiartana., 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Andi Offset, Yogyakarta.

Kusmaryanto,CB, 2005, *Tolak Aborsi*, Primavera, Yogyakarta.

Paulinus Soge, 2010. *Hukum Aborsi : Tinjauan Politik Hukum Pidana terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit UAJY bekerja sama dengan Program Pascasarjana UAJY.

### Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989,Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.

### Website :

[www.genderkesrepro.info.com](http://www.genderkesrepro.info.com),Siswandi Suarta, Kontroversi Seputar Aborsi.

[www.kompas.com](http://www.kompas.com), inses dengan indikasi medis.

[www.artikelincest](http://www.artikelincest), 6 Februari 2012.

### Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.